

ISSN
19071434



mastan
Masyarakat Standarisasi Indonesia
Komitmen terhadap Kualitas



Jurn@l Teknik Industri



Volume
VII

Nomor
2

Halaman
69 - 138

Semarang
Mei
2012



Jurn@l Teknik Industri

Volume VII, No 2, Mei 2012, 69 - 138

I S S N 1907 - 1434

Daftar Isi

- Kajian Pemetaan dan Optimalisasi Potensi Pajak dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember
Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati, Ciplis Gema Qori'ah 69 - 76
- Pengaruh Motivasi Kerja dan Gaya Kepemimpinan terhadap Disiplin Kerja serta Dampaknya pada Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada PT. PLN (Persero) APD Semarang)
Aries Susanty, Sigit Wahyu Baskoro 77 - 84
- Pemilihan Sistem Penyediaan Air Baku di Pulau Kahakitang Kabupaten Kepulauan Sangihe
Ariestides K.T. Dundu, R.J.M. Mandagi 85 - 94
- Usulan Perbaikan Kualitas Pelayanan pada Instalasi Rawat Jalan dengan Metode *SERVQUAL* dan *TRIZ* (Studi Kasus di RS Muhammadiyah Roemani)
Diana Puspita Sari, Andry Harmawan 95 - 104
- Penggunaan Metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dalam Penentuan Prioritas Program Kesehatan (Studi Kasus Program Promosi Kesehatan)
Kasman Makkasau 105 - 112
- Strategi Pengembangan Usaha Kerajinan Enceng Gondok sebagai Produk Unggulan Kabupaten Semarang Menggunakan Analisis Rantai Nilai
Nia Budi Puspitasari, Ary Arvianto, Dina Tauhida, Aditya Hendra S. 113 - 122
- Prioritas Penentuan Lokasi Waduk pada DAS Ciliwung untuk Pengendalian Banjir Jakarta
Rommy Martdianto, Trihono Kadri 123 - 130
- Penilaian Teknologi untuk Menentukan Posisi Industri Pesaing
Wahyu Susihono 131 - 138

KAJIAN PEMETAAN DAN OPTIMALISASI POTENSI PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN JEMBER

Adhitya Wardhono, Yulia Indrawati, Ciplis Gema Qori'ah
Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi - Universitas Jember, Jember
Jl. Jawa 17, Kampus Bumi Tegal Boto
Jember 68121 – Jawa Timur
Telp: (0331) 337990/ 08155999 3626, Fax: (0331) 332150
a_wardhono@yahoo.com

Abstrak

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah, seperti yang tertuang dalam UU No 32 dan 33 tahun 2004. Dengan lahirnya peraturan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan sumber penerimaan PAD tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Di Kabupaten Jember, potensi penerimaan pajak masih belum tergali secara optimal atau masih lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi daerah. Realisasi penerimaan pajak daerah rata-rata tahun 2003-2006 sebesar 28,30% lebih rendah dibandingkan penerimaan retribusi yaitu 44,33% (APBD, 2003-2006). Dengan demikian perlu dilakukan identifikasi optimalisasi potensi pajak daerah dengan evaluasi permasalahan yang selama ini terjadi, sehingga pada gilirannya dapat dirumuskan kebijakan pemerintah yang lebih sesuai dan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pajak yang sangat tidak berpotensi di Kabupaten Jember dengan tolak ukur hasil (*yield*) adalah pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Sedangkan pajak yang sangat berpotensi adalah pajak galian golongan C. Penilaian persepsi masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah faktor kelembagaan sebesar 55% dengan kriteria faktor adalah masih rendahnya *law of enforcement* terhadap tindakan penyalahgunaan penerimaan pajak dan masih lemahnya sistem administrasi dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah. Rekomendasi kebijakan adalah pentingnya pengelolaan pajak daerah yaitu 62% melalui peningkatan inovasi dalam sistem pemungutan pajak dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

Kata kunci: otonomi daerah, pendapatan asli daerah, pajak

Abstract

In autonomy concept of area, local government has important role in arranging and managing its own area, including financial management, which is decanted in UU No 32 and 33 2004. Regulation of local government expected to be more can dig potency of source of acceptance of area in defraying all activities development of area through make-up of Local Real Earning. Source of acceptance of the LRE can be conducted through intensification and extensification tax area and retribution. In Jember regency, acceptance of area tax was not optimal result while compared to local retribution. In 2003 – 2006, percentage of local tax contribution showed 28,30%, it has lower value than local retribution which has 44,33% (APBD, 2003-2006). Therefore, it requires to be identified local tax optimization through previous problems evaluation, so that in turn can be formulated government policies precisely. The empirical result of this study indicated that in Jember regency, type of low potential tax are hotel and restaurant, amusement, entertainment and light road. Other case, dig tax on group C has potential local earning. Society perception on influence factor of tax earning optimization is institutional factor which appeared 55%, considering on imperfect law enforcement and administrative system. The importance of policy recommendations is local tax management which reach 62% through innovation on imposition tax system and improvement of human resource quality through training and education.

Keyword: local autonomy, local real earning, tax

PENDAHULUAN

Pelaksanaan UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No 25 tahun 1999 tentang desentralisasi fiskal, kemudian direvisi oleh UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004 tentang hal yang sama, telah menyebabkan perubahan mendasar mengenai hubungan antara pusat dan daerah khususnya dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih dikenal dengan otonomi daerah. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharapkan untuk lebih mampu menggali potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai segala aktivitas pembangunan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berkaitan dengan peningkatan PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan PAD. Identifikasi pajak perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui prinsip keadilan, demi tercapainya kemakmuran masyarakat di daerah itu sendiri. Dengan prinsip tersebut paradigma negatif mengenai pelaksanaan otonomi daerah, bahwa masyarakat adalah beban pembangunan, dapat diminimalisir. Pandangan bahwa masyarakat adalah obyek pembangunan harus diubah menjadi subyek utama pembangunan daerah. Pada era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, kemandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah akan semakin penting. Kemandirian ini berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Kemandirian yang tinggi akan memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi gejolak perekonomian nasional maupun internasional yang pada akhirnya mempengaruhi besar-kecilnya penerimaan bantuan dari pusat.

Kemandirian dalam pengelolaan PAD merupakan kunci kemandirian daerah. Sumber PAD yang berasal dari pajak dan retribusi daerah masih terbuka luas untuk dikembangkan. Di kebanyakan kabupaten/

kota, PAD hanya menyumbang 5 – 9 persen dari penerimaan APBD kota/kabupaten, hanya beberapa kota/kabupaten saja yang memiliki PAD lebih dari 10 persen. Menurut Kuncoro (2004), beberapa daerah memiliki prosentase penerimaan PAD sangat kecil dibandingkan penerimaan dari sektor fiskal lainnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kurang mampu mendayagunakan potensi daerah dalam membangun daerahnya sendiri.

Tabel 1 Komposisi Penerimaan Pemerintah Daerah 1999/2000-2001

	1999/2000 (%)	2000 (%)	2001 (%)
Propinsi	100,00	100,00	100,00
- PAD	37,22	32,30	32,23
- Dana Bagi Hasil	18,66	15,94	25,89
- DAU/DAK	44,12	51,76	41,88
Kabupaten/Kota	100,00	100,00	100,00
- PAD	10,31	9,04	4,99
- Dana Bagi Hasil	12,39	11,31	22,43
- DAU/DAK	77,33	79,65	72,58

Sumber : Simanjuntak & Mahi (2003) dalam Kuncoro (2004)

Penerimaan PAD Kabupaten Jember yaitu sebesar Rp. 54.714.430.537,73 untuk tahun 2007. Peningkatan PAD cukup signifikan dengan realitas potensi sumber PAD yang ada. Untuk tahun anggaran 2006, realisasi PAD sebesar Rp.68.448.355.651,27 dari anggaran sebesar Rp. 53.189.640.812,73. Potensi penerimaan pajak masih belum tergali secara optimal. Dibandingkan dengan penerimaan dari retribusi daerah, penerimaan pajak daerah masih lebih rendah. Kabupaten Jember, realisasi penerimaan pajak daerah rata-rata tahun 2003-2006 sebesar 28,30% lebih rendah dibandingkan penerimaan retribusi yaitu 44,33% (APBD, 2003-2006). Belum tercapainya realisasi pajak dalam memenuhi target yang ditetapkan menjadi permasalahan utama yang penting untuk diidentifikasi penyebabnya. Beberapa faktor yang menyebabkan belum tergalinya potensi pajak antara lain masih rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya sistem

kawasan Subosuka Wonosraten Jawa Tengah tahun 2002 meliputi Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klatèn: Tujuan dari studi adalah untuk menganalisis potensi PAD khususnya pajak dan retribusi daerah di kawasan Subosuka, Wonosraten. Model yang digunakan dalam studi ini adalah collection ratio untuk menghitung rasio anggaran penerimaan dan realisasi, model pertumbuhan untuk menghitung pertumbuhan penerimaan daerah tahun ke tahun, model proporsi untuk menghitung proporsi tiap komponen penerimaan dengan penerimaan total dan matrik potensi penerimaan daerah. Hasil studi menunjukkan beberapa pajak sebelum UU No.18/1997 seperti pajak reklame, penerangan jalan, hiburan, pembangunan I, pendaftaran perusahaan asing, pajak minuman keras, rumah bola, pajak anjing. Sedangkan retribusi daerah sebelum UU No.18/1997 tidak berbeda dengan jumlah penerimaan pajak. Potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2002 menggunakan obyek penelitian 6 pajak daerah dan 11 retribusi sejak diberlakukan UU No.18/1997 yang dianalisis menggunakan lima tolak ukur yaitu yield, ability to implement, equity, economic efficiency dan suitability as a local source. Hasil studi menunjukkan dari segi yield, semua pajak dan retribusi masih bisa ditingkatkan dan tergantung dari ability to implement dalam usaha pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi yang tidak memiliki potensi adalah pajak galian tambang golongan C dan retribusi penyeberangan di atas air. Sedangkan dari sisi equity, economic efficiency dan suitability as a local source, seluruh pajak dan retribusi memiliki potensi.

METODOLOGI

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian Optimalisasi Potensi Pajak dalam rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jember meliputi; identifikasi potensi pajak daerah di Kabupaten Jember, identifikasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak

daerah di Kabupaten Jember dan melakukan kajian rumusan strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jember. Penelitian ini berlokasi di kabupaten Jember dan data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer dan data sekunder antara tahun 2003 sampai 2007. Obyek penelitian yaitu pajak sebagaimana diatur dalam UU No.32 tahun 2004 dalam hal ini meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan galian golongan C.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data sekunder tahun 2003-2007

- a). Kantor Badan Pusat Statistik untuk data Produk Domestik Bruto Regional Bruto (PDRB) dan Anggaran Pembangunan Dan Belanja Daerah (APBD).
- b). Kantor Unit Pelaksana Teknis Pendapatan Daerah Provinsi, Bappekab, Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dan Instansi lain yang dianggap perlu.

2) Data primer

Diperoleh melalui penyebaran kuisisioner untuk menangkap persepsi orang-orang yang expert terkait dengan pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan air permukaan. Pengambilan data dilakukan dengan observasi langsung dan terpadu dilengkapi dengan pengisian kuisisioner dengan harapan observasi yang dilakukan memiliki tingkat obyektivitas dan ketelitian yang akurat.

3. Teknik Analisis Data

1) Statistik Deskriptif

Suatu analisis yang berguna untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian secara universal, diantaranya menggunakan teknik variance test untuk melihat keseragaman sampel, sedangkan sensitivity test adalah untuk mengetahui perubahan situasi dan kondisi objek penelitian. Sebelum data dianalisis, akan dilakukan seleksi data sampel untuk

4. Hasil Analisis

1) Analisis Struktur Penerimaan Daerah Kabupaten Jember

Salah satu ukuran untuk menentukan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dapat dilihat dari struktur penerimaan anggaran. Struktur penerimaan APBD juga untuk melihat kecenderungan arah perubahan sehingga dapat dijadikan salah satu pedoman untuk menentukan strategi yang tepat. Sumber utama penerimaan daerah Kabupaten Jember untuk membiayai rencana pembangunan daerah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu pendapatan asli daerah dan pendapatan dari instansi yang lebih tinggi seperti dana Pemda Propinsi atau dana pemerintah pusat atau yang lebih sering disebut dana perimbangan. Dana yang bersumber dari instansi yang lebih tinggi merupakan hasil bagi dari pajak atau nonpajak, ditambah bantuan dan sumbangan.

Tabel 4.1. menunjukkan bahwa peranan PAD dalam mendukung APBD kurang baik yang ditunjukkan dengan tren yang menurun pada tahun anggaran 2007. Hal ini menunjukkan otonomi daerah dalam penyusunan RAPBD di Kabupaten Jember belum didukung oleh kemandirian daerah secara finansial. Jika dilihat dari struktur PAD, terlihat

bahwa retribusi daerah merupakan proporsi terbesar dari PAD sampai tahun anggaran 2007 adalah 52%. Di sisi lain proporsi pajak menunjukkan nilai sebesar 29% dari PAD.

2) Peran Pajak Daerah terhadap Penerimaan Daerah

Kontribusi pajak daerah sebagai komponen terbesar kedua setelah retribusi daerah terhadap PAD akan memberikan kontribusi cukup besar pula dalam komposisi penerimaan daerah. Kontribusi masing-masing pajak daerah dapat dilihat dari perbandingan atau rasio antara realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah, pendapatan asli daerah dan total penerimaan daerah.

Tabel 2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 – 2006 (dalam %)

Jenis Pajak	Rasio terhadap Total Pajak Daerah	Rasio terhadap PAD	Rasio terhadap Total Penerimaan Daerah
Pajak Hotel & Restoran	0.0432	0.0122	0.0014
Pajak Hiburan	0.0091	0.0026	0.0003
Pajak Reklame	0.0501	0.0142	0.0016
Pajak Penerangan Jalan	0.8906	0.2521	0.0285
Pajak Galian Gol. C	0.0071	0.0020	0.0002

Tabel 3. Sumber-Sumber Penerimaan Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2007 (dalam Rupiah)

POS	2005	2006	2007
Pendapatan Asli Daerah	51.471.626.032,58	68.448.355.651,27	54.714.430.537,73
Pajak Daerah	16.311.036.159,00	19.178.932.829,50	16.087.000.000,00
Retribusi Daerah	22.625.551.640,00	25.306.988.809,00	28.552.862.600,00
Bag. Laba BUMD	3.778.804.619,68	6.451.675.856,25	5.941.992.937,73
Lain-Lain Pendapatan	8.756.233.613,90	17.510.758.156,52	4.132.575.000,00
Dana Perimbangan	37.389.573.316,00	874.661.235.907,54	953.755.900.000,00
Bagi Hasil Pajak	36.601.781.270,00	43.754.050.419,00	26.144.900.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak	787.792.046,00	1.822.402.308,54	0
DAU	500.842.999.992,00	770.394.000.000,00	861.126.000.000,00
DAK	0	15.480.000.000,00	66.485.000.000,00
Bagi Hasil Pajak Propinsi	31.086.318.477,00	43.210.783.180,00	37.162.635.000,00
Penerimaan Lainnya	38.062.290.000,00	0	37.222.635.000,00
Total Penerimaan	658.852.807.817,58	943.109.591.558,81	1.045.692.965.537,73

Sumber : Dispenda, Laporan Pendapatan Daerah, 2005-2007

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pajak yang sangat tidak berpotensi di Kabupaten Jember dengan tolak ukur hasil (yield) adalah pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Sedangkan pajak yang sangat berpotensi adalah pajak galian golongan C. Berdasarkan tolak ukur kemampuan untuk melaksanakan (ability to implement), pajak yang sangat berpotensi adalah pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum dan pajak galian golongan C, sedangkan pajak yang berpotensi adalah pajak reklame.

Berdasarkan hasil penilaian persepsi masyarakat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah faktor kelembagaan sebesar 55% dengan criteria faktor adalah masih rendahnya law of enforcement terhadap tindakan penyalahgunaan penerimaan pajak dan masih lemahnya sistem administrasi dalam pengelolaan penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan hasil penilaian persepsi masyarakat mengenai rekomendasi kebijakan bagi upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah adalah pentingnya kebijakan dalam pengelolaan pajak daerah yaitu 62% melalui peningkatan inovasi dalam sistem pemungutan pajak. Kebijakan lainnya adalah pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Analytical Hirarchical Process,(2003). Modul Pelatihan, Universitas Gadjah Mada.
2. Arsyad, Lincolyn,1999.Pengantar Perencanaan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta.
3. Azis, Iwan Jaya, (1994). "Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
4. Devas, N, Brian Binder, Anne Both, Kenneth Davey, and Roy Kelly, (1989), Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 61-62.
5. Insukindro, Mardiasmo, Wahyu Hidayat, Wihana Kirana Jaya, BM. Purwanto, Abdul Halim, John Suprihanto, A. Budi Purnomo, (1994). Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Buku I, KKD, Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
6. Jamil,A, dan Rahayu Astuti, (1997). Analisis Pajak Pembangunan I Perhotelan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Kotamadya Yogyakarta, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 2 Nomor 3.
7. Kuncoro, Mudrajad, (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Penerbit Erlangga. Jakarta.
8. Mardiasmo dan Makhfateh, (2000). Perhitungan Potensi Pajak dan Restribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan akhir Pusat Antar Universitas, Studi Ekonomi , Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
9. Mulyono, Sri, (1988). "AHP Suatu Model Baru yang Serbaguna", Ekonomi Keuangan Indonesia Vol. 36 No.3.
10. Musgrave, Richard A dan Musgrave, Peggy B, (1989). McGraw Hill, New York.
11. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
12. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
13. Republik Indonesia. Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
14. Saaty, Thomas, (1986). "Axiomatic Foundation of The Analytic Hierarchy Process", Management.
15. UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Dirjen PUOD Jakarta.
16. UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta.
17. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dirjen PUOD, Jakarta